

# 1 Juni yang (Pernah) Hilang

Oleh: Hendra Kurniawan

PANCASILA sebagai dasar negara tidak disusun secara serta merta, namun mengalami proses filsafati yang mendalam dan tidaklah mudah. Seiring dengan perjalanan hidup bangsa ini, Pancasila juga mengalami sejarah panjang penuh polemik yang sarat muatan politis. Salah satunya mengenai penetapan Hari Lahir Pancasila yang ternyata bukan persoalan sederhana dan sempat menjadi bahan perebutan kepentingan.

Dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) di akhir bulan Mei 1945 dibicarakan dasar bagi negara Indonesia merdeka yang akan dibangun. Tanggal 29 Mei 1945, Mohammad Yamin menyampaikan konsepsinya mengenai dasar negara yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri Ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pidato ini disusul oleh Soepomo yang pada tanggal 31 Mei 1945 menyampaikan pula gagasannya mengenai dasar negara yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Sayangnya kedua konsep ini belum berhasil memenuhi keinginan sidang.

Tanggal 1 Juni 1945 kegelisahan sidang terpecahkan oleh pidato Bung Karno yang dianggap memberi jawaban memuaskan bagi persoalan dasar negara. Hal ini diungkapkan oleh Bung Hatta dalam suratnya kepada Guntur Sukarno Putra tanggal 16 Juni 1978. Dalam surat ini, Bung Hatta sama sekali tidak menyinggung konsepsi yang diutarakan oleh Mohammad Yamin maupun Soepomo. Bung Hatta menjelaskan bahwa kebanyakan anggota BPUPKI tidak mau menjawab persoalan dasar negara. Alasannya karena takut akan menimbulkan persoalan filosofi yang berkepanjangan dan akan memperlambat pembicaraan mengenai Undang-Undang Dasar (UUD).

Dalam pidatonya yang berjudul Pancasila, gagasan mengenai lima sila disampaikan Bung Karno kira-kira satu jam lamanya. Pidato ini menarik perhatian sidang dan disambut dengan tepuk tangan membanjir. Bung Karno menyampaikan konsepsi dasar negara meliputi kebangsaan, kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan Ketuhanan yang berkebudayaan. Bung Karno juga meng-

usulkan nama dasar negara tersebut ialah Pancasila atas petunjuk seorang temannya yang ahli bahasa, tanpa menyebutkan nama. Menurut Bung Karno, Pancasila dapat diperas menjadi Trisila yaitusosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan Ketuhanan. Semua ini mengem-

casila yang disampaikan Bung Karno tersebut. Pada tanggal 22 Juni 1945 rumusan Panitia Sembilan ini diberi nama Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang dimasukkan ke dalam Pembukaan UUD 1945. Pancasila dan UUD 1945 lalu disahkan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Republik Indonesia diproklamkan.

Sebelum disahkan, Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 ini mengalami sedikit perubahan dengan dicoretinya tujuh kata di belakang kata Ketuhanan, yaitu "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Keputusan ini menjadi wujud penghargaan terhadap multikulturalisme bangsa karena meniadakan kesan seolah dibedakan antara warga negara yang

tahan lama. Dasar negara jangan dibuat sendiri melainkan harus digali dari kekayaan peradaban bangsa.

Penguasa Orde Baru ternyata memanfaatkan pernyataan Bung Karno tersebut untuk menghilangkan peringatan Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni. Hal ini diperkuat oleh sejarahwan Orde Baru, Nugroho Notosusanto, yang berpendapat bahwa Bung Karno hanyalah salah seorang yang berarti bukan satu-satunya orang yang mengutarakan konsep dasar negara. Sejarah tidak dapat berbohong apabila Mohammad Yamin dan Soepomo juga menjadi konseptor dasar negara. Menurut Nugroho, jika tanggal 1 Juni menjadi Hari Lahir Pancasila, maka muncul pertanyaan "Pancasila yang mana?".

Kalau jawabannya adalah Pancasila Bung Karno maka hal itu dapat

**Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila menjadi polemik historisitas yang berkepanjangan. Bung Karno sendiri pernah menyatakan bahwa beliau bukan pencipta atau pembentuk Pancasila, melainkan penggali Pancasila. Dalam amanatnya tanggal 22 September 1945 di Surabaya, Bung Karno berkata: "Aku bukan pencipta Pancasila. Pancasila diciptakan oleh bangsa Indonesia sendiri. Aku hanya menggali Pancasila daripada buminya bangsa Indonesia. Aku sembahkan Pancasila ini di atas persada bangsa Indonesia kembali untuk dipakai sebagai dasar daripada wadah yang harus berisi masyarakat yang beraneka ragam, beraneka suku, beraneka adat istiadat."**

beragama Islam dan bukan Islam. Menyitir kata Bung Karno bahwa kita hendak mendirikan negara "semua buat semua", bukan untuk satu atau dua golongan saja, tapi Indonesia untuk Indonesia.

#### Polemik historisitas

Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila menjadi polemik historisitas yang berkepanjangan. Bung Karno sendiri pernah menyatakan bahwa beliau bukan pencipta atau pembentuk Pancasila, melainkan penggali Pancasila. Dalam amanatnya tanggal 22 September 1945 di Surabaya, Bung Karno berkata: "Aku bukan pencipta Pancasila. Pancasila diciptakan oleh bangsa Indonesia sendiri.

Aku hanya menggali Pancasila daripada buminya bangsa Indonesia. Aku sembahkan Pancasila ini di atas persada bangsa Indonesia kembali untuk dipakai sebagai dasar daripada wadah yang harus berisi masyarakat yang beraneka ragam, beraneka suku, beraneka adat

dibenarkan." Jika Pancasila sebagai dasar negara yang sah dan otentik (seperti yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945), maka tanggal 1 Juni tidak dapat dibenarkan. Pancasila sebagai dasar negara dalam Pembukaan UUD 1945 tidak hanya bersumber dari Pancasila Bung Karno namun juga konsepsi Mohammad Yamin dan Soepomo yang kemudian diolah oleh Panitia Sembilan menjadi Piagam Jakarta hingga selanjutnya mengalami perubahan dan disahkan oleh PPKI. Maka menjadi lebih tepat jika tanggal 18 Agustus dijadikan sebagai Hari Lahir Pancasila yang sah dan otentik.

Prof. Mr. Abdoel Gaffar Pringgodigdo memiliki pandangan yang

agak berbeda meskipun pada dasarnya membenarkan pendapat Nugroho. Menurutnya, Pancasila sudah ada sejak dulu. Pancasila sudah lama terurat pada jiwa bangsa Indonesia secara turun-temurun dan menjadi karakter bangsa. Pringgodigdo menyimpulkan bahwa

Sejalan dengan berbagai peristiwa dapat tersebut maka pemerintah Orde Baru memutuskan untuk tidak lagi memperingati Hari Lahir Pancasila yang hingga tahun 1969 selalu diperingati. Selain alasan tidak ada dasar hukumnya, pemerintah Orde Baru rupanya lebih ingin mempertahankan upaya penumpasan Gerakan 30 September 1965 yang berhasil dilakukan pada tanggal 1 Oktober 1965 sebagai momentum penting. Saat itu upaya mengganti ideologi negara Pancasila menjadi komunisme berhasil digagalkan. Maka bagi Orde Baru yang wajib diperingati ialah tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila.

Tentu keputusan tersebut sara dengan muatani politis dan menjadi upaya de-Soekarno-isasi. Peran dan jasa Soekarno hendak dikecilkan atau bahkan dihilangkan. Keputusan untuk memakamkan beliau jauh dari pusat pemerintahan Jakarta menjadi upaya pertama menjauhkan sosok Bung Karno.

Setelah sembilan tahun wafatnya, makam Bung Karno baru dipugar dan mendapat perhatian dari pemerintah. Penamaan Bandaranegara Cengkareng menjadi Soekarno Hatta dan pengangkatan keduanya sebagai Pahlawan Proklamator merupakan wujud penghargaan yang terlambat. Bahkan kemudian muncul masalah karena pada tahun 2012 yang lalu Soekarno-Hatta justru dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Pada akhirnya tidak dapat dipungkiri bahwa berbicara tentang Hari Lahir Pancasila tidak dapat lepas dari rasa *like and dislike* terhadap Bung Karno.

Runtuhnya hegemoni Orde Baru menimbulkan banyak upaya untuk mengembalikan peran dan jasa Soekarno pada posisinya, termasuk soal tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Penetapan Pancasila seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar negara oleh sidang PPKI memang dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945. Akan tetapi kenyataan sejarah telah membenarkan bahwa Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Bung Karno dalam pidatonya di hadapan sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945.

Mohammad Yamin dan Soepomo juga konseptor dasar negara namun tidak menyebutnya sebagai Pancasila. Tanpa hendak meniadakan peran yang lain dan mematahkan berbagai pemikiran yang pernah

muncul, tetapih layak apabila Hari Lahir Pancasila disahkan untuk diperingati kembali setiap tanggal 1 Juni. Ini dapat menjadi upaya awal untuk menghadirkan kembali Pancasila secara lebih aktual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mulai melupakan keberadaan